



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIWULAN II
TAHUN 2025**

"Nasudhaira Kutumbakam"

Dalam konsep Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP berada pada level *first line defense* sedangkan Manajemen Risiko berada pada level *second line defense* yang mengelola risiko lintas intern OPD, serta Inspektorat selaku aparat pengawas intern bertindak sebagai *third line defense*. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

1. Komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;
2. Pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses Manajemen Risiko;
3. Kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan *culture/budaya* yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;
4. Kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
5. Metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;
6. Pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian risiko bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan
7. Pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian risiko.

B. DASAR HUKUM

Dasar penyusunan Manajemen Risiko adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Inspektorat Daerah Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya. Tahapan dalam pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan berikut :

1. Menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
2. Melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
3. Mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem serta mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
4. Melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampaknya;
5. Melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
6. Melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
7. Melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit)

Tingkat risiko dapat diketahui dengan menggunakan dua dimensi, yaitu:

1. Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
2. Tingkat dampak yang dihasilkan risiko.

Nilai kemungkinan terjadinya risiko diukur berdasarkan kriteria kemungkinan dan skala kemungkinan terjadinya risiko tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

Kriteria dan Skala Kemungkinan Terjadi Resiko

| No | Kriteria Kemungkinan | Definisi Kriteria Kemungkinan | Skala Nilai |
|----|----------------------|--|-------------|
| 1 | Sangat Kecil | Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun | 1 |
| 2 | Kecil | Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun | 2 |
| 3 | Moderat | Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun | 3 |
| 4 | Hampir Pasti | Hampir pasti terjadi dalam periode 1 tahun | 4 |
| 5 | Pasti | Pasti terjadi dalam periode 1 tahun | 5 |

Untuk tingkat dampak yang dihasilkan dari risiko diukur berdasarkan kriteria dampak dan skala dampak yang dihasilkan risiko tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

Kriteria Skala Dampak Terjadi Resiko

| No | Kriteria Dampak | Definisi Kriteria Dampak | Skala Nilai |
|----|-----------------|--|-------------|
| 1 | Individu | Berdampak terhadap Individu Pejabat/Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan | 1 |
| 2 | Sub Unit Kerja | Berdampak terhadap Satuan Unit Kerja atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan | 2 |
| 3 | Unit Kerja | Berdampak Terhadap Kantor Unit Kerja | 3 |
| 4 | Instansi | Berdampak terhadap Pemerintah Kota Denpasar. | 4 |

Dari hasil penilaian kemungkinan risiko dan dampak risiko maka dapat diketahui tingkat risiko.

A. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 47 risiko (populasi risiko) dengan rincian 6 Risiko Strategis Pemda (RSP), 6 Risiko Strategis OPD (RSO), 14 Risiko Operasional OPD (ROO) dan 21 Risiko Fraud (RF) sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 (form 4).

B. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 47 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut :

Terdapat 6 jumlah risiko prioritas (RSP) yang di laksanakan di Triwulan II Tahun 2025 pada lampiran 2 (form 5).

C. Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Risiko Triwulan II

Terdapat 6 jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan di Triwulan II Tahun 2025 pada Lampiran 3 (form 8).

BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja organisasi. Dari 14 risiko operasional OPD (ROO), 21 risiko fraud (RF), dan 6 risiko strategis OPD (RSO) yang teridentifikasi semua risiko dapat terkendali dengan baik. Hambatan yang ditemukan yaitu dalam pelaksanaan pemenuhan Indikator Kinerja Utama yang sejalan dengan pemetaan Risiko Strategis Pemda (RSP), yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

| No. | Risiko Strategis Pemda | Hambatan |
|-----|--|--|
| 1. | Tuntutan penguatan peningkatan kapabilitas APiP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal | Adanya percepatan timeline monitoring pengisian pemenuhan data PK APiP, hal tersebut menjadi hambatan dikarenakan belum berakhirnya periode Triwulan II namun beberapa data sudah harus dipenuhi, untuk tetap mempertanggungjawabkan penyelesaian tugas data yang harus dipenuhi telah disusun kertas kerja prediksi untuk dicocokkan dengan realisasi riil saat cut off periode Triwulan II sehingga pengisian data bisa segera dilaksanakan saat Triwulan II sudah berakhir. |
| 2. | Tuntutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif | Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan maturitas SPIP Kota Denpasar, telah melaksanakan bimbingan teknis Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2025. |
| 3. | Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar | Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melakukan pendampingan BPK atas pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari sampai 21 Maret 2025. |

| No. | Risiko Strategis Pemda | Hambatan |
|-----|--|---|
| 4. | Menurunnya predikat RB OPD di Pemerintah Kota Denpasar | Sampai dengan Triwulan II <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> terus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar untuk memfasilitasi OPD dalam pemenuhan data RB. |
| 5. | Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik | Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar sedang melaksanakan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sesuai surat Nomor 700.1.2/779/ltko hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 20 Pebruari 2025. Pada tanggal 17-18 Pebruari Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2024. |
| 6. | Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar | Pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> terus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar untuk memfasilitasi OPD dalam merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya. |

BAB IV
MONITORING DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

a) Keterjadian Risiko yang teridentifikasi

| No. | Risiko Prioritas | Uraian Pengendalian yang sudah ada | Rencana Tindak Pengendalian | Terjadi / Tidak Terjadi | Ket. |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Tuntutan penguatan peningkatan kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal | Melakukan pelatihan dalam rangka penilaian Kapabilitas APIP dengan mengundang Narasumber dari BPKP | Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP | Sd Triwulan II risiko tidak terjadi | Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 |
| 2. | Tuntutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif | Melaksanakan Pelatihan SPIP melalui daring dengan narasumber dari BPKP | Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dalam memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP | Sd Triwulan II risiko tidak terjadi | Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 |
| 3. | Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah kota Denpasar | Terlaksananya reviu LKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan | Sd Triwulan II risiko tidak terjadi | Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 |
| 4. | Menurunnya predikat RB OPD di Pemerintah Kota Denpasar | Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam | Sd Triwulan II risiko tidak terjadi | Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak |

| No. | Risiko Prioritas | Uraian Pengendalian yang sudah ada | Rencana Tindak Pengendalian | Terjadi / Tidak Terjadi | Ket. |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi. | | terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 |
| 5. | Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik | Terlaksananya Penilaian Monitoring dan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP | Sd Triwulan II risiko tidak terjadi | Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 |
| 6. | Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar | Melakukan Reviu, Monitoring dan Evaluasi serta pendampingan kepada OPD binaan | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | Sd Triwulan II risiko tidak terjadi | Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 |

Form 7 MR Tahun 2025 (data diolah)

b) Keterjadian Risiko yang belum teridentifikasi

Dari Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko Strategis Pemda (RSP) yang dimonitoring terdapat kejadian risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal sampai dengan Triwulan II belum ada risiko yang terjadi.

BAB V PENUTUP

Manajemen Risiko Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa seiring berjalannya waktu perlu adanya identifikasi ulang atas risiko yang terjadi, yang disebabkan oleh perubahan regulasi maupun faktor eksternal lainnya sehingga keterjadian risiko tersebut diluar kendali OPD. Untuk itu komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern yang dilaksanakan, sehingga peningkatan penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Denpasar, 4 Juli 2025

Inspektur Daerah Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djyaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19650726 199201 2 001

LAMPIRAN

Form 2.b
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

| | | | |
|---|---|---|---------|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Daerah Kota Denpasar | |
| Penilaian Tahun | : | 2025 | |
| Periode yang Dinilai | : | RPJMD 2021-2026 | |
| Urusan Pemerintahan | : | Unsur Pengawasan Pemerintah | |
| OPD yang Dinilai | : | Inspektorat | |
| Sumber Data | Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 | | |
| Tujuan Strategis | Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik | | |
| Sasaran Strategis | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | | |
| IKU Renstra OPD | No | IKU | Target |
| | 1 | Level Kapabilitas APIP | Level 3 |
| | 2 | Level Maturitas SPIP | Level 3 |
| | 3 | Persentase OPD yang didampingi/yang mendapat pendampingan | 80% |
| Program | | | |
| Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko | Tujuan strategis: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik | | |
| | Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | |
| | IKU Strategis: 1. Level Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP 3. Persentase OPD yang yang didampingi/yang mendapat pendampingan | | |
| | Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | | |

Denpasar, 5 Januari 2025
Inspektur Daerah Kota Denpasar


 Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Nama Pemda | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar | | |
| Penilaian Tahun | : 2025 | | |
| Periode yang Dinilai | : RPJMD Tahun 2021-2026 | | |
| Urusan Pemerintahan | : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | |
| OPD yang Dinilai | : Inspektorat | | |
| Sumber Data | Renja Inspektorat Tahun 2024 | | |
| Tujuan Strategis | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | |
| Program Inspektorat Kota Denpasar (Renja tahun 2024) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | | |
| Keluaran/ Hasil Kegiatan | No | Nama Keluaran/Hasil Kegiatan | Target |
| | 1 | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1 Kegiatan |
| | 2 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1 Laporan |
| | 3 | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | 1 Kegiatan |
| | 4 | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 36 OPD |
| Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko | <p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4. Pendampingan dan Asistensi <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 3. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 4. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | | |
|  <p style="text-align: center;">Denpasar, 5 Januari 2025 Inspektur Daerah Kota Denpasar</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. Putu Naning Djavaningsih, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650726 199201 2 001</p> | | | |


Form 2.c.1
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

| | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Daerah Kota Denpasar | |
| Penilaian Tahun | : | 2025 | |
| Periode yang Dinilai | : | RPJMD Tahun 2021-2026 | |
| Urusan Pemerintahan | : | Unsur Pengawasan Pemerintahan | |
| OPD yang Dinilai | : | Inspektorat | |
| Sumber Data | | Renja Inspektorat Tahun 2024 | |
| Tujuan Strategis | | Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik | |
| Program Inspektorat Kota Denpasar (Renja tahun 2024) | | 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | |
| Keluaran/ Hasil Kegiatan | No | Nama Keluaran/Hasil Kegiatan | Target |
| | 1 | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1 Kegiatan |
| | 2 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1 Laporan |
| | 3 | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | 1 Kegiatan |
| | 4 | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 36 OPD |
| Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko | Program: | 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | |
| | Kegiatan: | 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4. Pendampingan dan Asistensi | |
| | Keluaran/Hasil Kegiatan: | 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 3. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 4. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | |
|  Denpasar, 5 Januari 2025 Inspektur Daerah Kota Denpasar <u>Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650726 199201 2 001 | | | |

Form 3.a
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

| Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar Nama OPD : Inspektorat Kota Denpasar Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------|---------------|---|------------------------|------|--|-------------------------------|
| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan | Indikator Kinerja | Uraian | Risiko | | Sebab | | | Dampak | |
| | | | | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | C/UC | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Tujuan Strategis Pemerintah: Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | | | | | | | | |
| 1 | Program: Penyelenggaraan Program Pengawasan | 1. Level Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP | Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal | RSP.25.35.04.01 | Kepala Daerah | Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran penguatan Kapabilitas APIP termasuk sarana dan prasarana pendukung belum optimal | Internal | C | Level Kapabilitas APIP menjadi di level 2 | Kepala Daerah dan OPD terkait |
| | | | Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif | RSP.25.35.04.02 | Kepala Daerah | Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah | Internal dan Eksternal | C | Level Maturitas SPIP tidak bisa mempertahankan level 3 | Kepala Daerah dan OPD terkait |
| | | | Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.03 | Kepala Daerah | Adanya faktor-faktor indikasi terjadinya fraud yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Internal dan Eksternal | C | Opini BPK (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa dipertahankan | Kepala Daerah dan OPD terkait |
| 2 | Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi | Persentase OPD yang mendapat pendampingan Inspektorat | Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.04 | Kepala Daerah | Masih ada program kerja pada OPD yang belum tepat sasaran, belum inovatif dan kreatif serta adaptif terhadap perubahan di dalam melakukan pelayanan publik. | Internal dan Eksternal | C | tidak bisa dipertahankan Predikat Reformasi Birokrasi minimal BB di Pemerintah Kota Denpasar | Kepala Daerah dan OPD terkait |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|-------------------|--|-----------------|---------------|--|------------------------|------|---|-------------------------------|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik | RSP.25.35.04.05 | Kepala Daerah | Kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara belum optimal | Internal dan Eksternal | C | tidak tercapainya hasil evaluasi SAKIP minimal A | Kepala Daerah dan OPD terkait |
| | | | Tuntutan untuk menurunkan temuan pada Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.06 | Kepala Daerah | Kurangnya pendampingan dari Inspektorat untuk mencegah terjadinya temuan pada OPD binaan | Internal | C | Tingkat kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku masih rendah | Kepala Daerah dan OPD terkait |



 Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

 Puji Naning Diyaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

| Nama Pemda | | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|-----------------|-----------|---|------------------------|------|---|-------------------------------|
| Nama OPD | | : Inspektorat | | | | | | | | |
| Tahun Penilaian | | : 2025 | | | | | | | | |
| Periode yang dinilai | | : Renstra Tahun 2021 - 2026 | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis | | : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | | | | | |
| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | | Dampak | |
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | C/UC | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | | | | | |
| | Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | | | | | | | | | |
| 1 | Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan | Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Denpasar | Tuntutan Penguatan dan Pertahanan Level Kapabilitas APIP Inspektorat | RSO.25.35.04.01 | Inspektur | Kurangnya SDM APIP yang memadai dan berkompeten serta kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan oleh APIP | Internal | C | Level Kapabilitas APIP Inspektorat menjadi level 2 | Kepala Daerah |
| | | | Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar | RSO.25.35.04.02 | Inspektur | Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk belum adanya sistem berbasis teknologi yang mempermudah proses. | Internal dan Eksternal | C | Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar menjadi level 2 | Kepala Daerah |
| | | | Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar | RSO.25.35.04.03 | Inspektur | Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap pemenuhan area MCP. | Internal dan Eksternal | C | Tidak tercapainya nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar minimal 80% | Kepala Daerah dan OPD terkait |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|--|--|-----------------|-----------|--|------------------------|------|---|-------------------------------|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| | | | | 5 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi | Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target. | RSO.25.35.04.04 | Inspektur | Kurangnya koordinasi, pemahaman dan komitmen OPD dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko | Internal dan Eksternal | C | Tidak tercapainya target penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko sebesar 90 % | Kepala Daerah dan OPD terkait |
| | | | Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | RSO.25.35.04.05 | Inspektur | Koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi belum optimal. | Internal dan Eksternal | C | Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi rendah yang menggambarkan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Kota Denpasar menjadi diragukan | Kepala Daerah dan OPD terkait |
| | | | Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat | RSO.25.35.04.06 | Inspektur | kurangnya tenaga pendamping dari Inspektorat Kota Denpasar | Internal | C | Kurang optimalnya pemenuhan dokumen serta perbaikan hasil evaluasi secara tepat waktu dan tepat sasaran. | OPD yang terkait |

Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar


 Ir. Putu Naniing Diavaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001



Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

| Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar Nama OPD : Inspektorat Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : Renstra Tahun 2021 - 2026 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---|----------|------|---|---------------------------------|
| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Pemilik | Sebab | | C/UC | Dampak | |
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah | Pelaksanaan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan | ROO.25.35.04.01 | Inspektur/ Sekretaris | Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak, kenaikan pangkat maupun kenaikan berkala | internal | C | Anggaran yang tersedia melebihi/kurang dari kebutuhan | Inspektur/ Sekretaris |
| 1 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Pelaksanaan | Terjadi kekurangan anggaran pembayaran gaji & tunjangan ASN | ROO.25.35.04.02 | Inspektur/ Sekretaris | 1. Bendahara gaji kurang cermat dalam menyusun perhitungan kebutuhan gaji 2. Terdapat pegawai mutasi | internal | C | Terlambatnya proses pembayaran gaji ASN | Inspektur/ Sekretaris |
| | | | Pelaksanaan | Terjadi gratifikasi dalam proses penyusunan anggaran Gaji ASN | RF.25.35.04.01 | Inspektur/ Sekretaris | 1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja | Inspektur/ Sekretaris |
| | | | Pertanggung jawaban | Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi kepegawaian terkait gaji/ pendapatan pegawai | RF.25.35.04.02 | Inspektur/ Sekretaris | Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak | internal | C | Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan rutin | Inspektur/ Sekretaris |
| 2 | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Pelaksanaan | Benturan kepentingan pelaksanaan diklat masing-masing APIP | ROO.25.35.04.03 | Inspektur/ Sekretaris/ Irban | Adanya hal-hal tidak terduga (upacara agama, hal lainnya) yang dialami APIP | internal | C | Tidak sesuai rencana diklat dengan realisasi diklat | Inspektur/ Sekretaris/ Irban |
| | | | Pelaksanaan | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.35.04.03 | Inspektur/ Sekretaris | Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa | internal | C | Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan | Inspektur/ Sekretaris |
| | | | Pertanggung jawaban | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.04 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris |
| 3 | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | Perencanaan | Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil | ROO.25.35.04.04 | Inspektur/ Sekretaris | Penyusunan kebutuhan barang pakai habis untuk tahun n+1 tidak berdasarkan pada daftar inventaris ataupun daftar stock opname | internal | C | Timbulnya praktik KKN | Inspektur/ Sekretaris |
| | | | Perencanaan | Terjadi keterlambatan pengajuan draft SK Walikota | ROO.25.35.04.05 | Inspektur/ Sekretaris | Kurang mencermati timeline pekerjaan | internal | C | Tidak memiliki dasar hukum atas pekerjaan dimaksud | Inspektur/ Sekretaris |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | | C/UC | Dampak | |
|----|---|---|---------------------|---|-----------------|--------------------------|---|----------|--------|---|-----------------------|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | | Pihak yang Terkena | |
| | | | | | Risiko | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Pelaksanaan | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.35.04.05 | Inspektur/ Sekretaris | Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa | internal | C | Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan | Inspektur/ Sekretaris | |
| | | | Pertanggung jawaban | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.06 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris | |
| 4 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Pelaksanaan | Benturan kepentingan dalam penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa | ROO.25.35.04.06 | Inspektur/ Sekretaris | Adanya intervensi pihak tertentu dalam proses pengadaan | internal | C | Timbulnya praktik KKN | Inspektur/ Sekretaris | |
| | | | Pelaksanaan | Tidak terakomodirnya rencana pengadaan barang ke dalam RKBMD | RF.25.35.04.07 | Inspektur/ Sekretaris | Rencana pengadaan barang belum terekap secara menyeluruh untuk diajukan ke BPKAD | internal | C | Kegiatan pengadaan barang tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan SILPA | Inspektur/ Sekretaris | |
| | | | Pertanggung jawaban | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.08 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris | |
| 5 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Pelaksanaan | Peningkatan tagihan Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | ROO.25.35.04.07 | Inspektur/ Sekretaris | Kenaikan tarif yang tidak dapat diprediksi karena adanya kebocoran pipa ataupun kesalahan billing/pencurian kuota | internal | C | Perlu nya penyesuaian anggaran | Inspektur/ Sekretaris | |
| | | | Pelaksanaan | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.35.04.09 | Inspektur/ Sekretaris | Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa | internal | C | Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan | Inspektur/ Sekretaris | |
| | | | Pertanggung jawaban | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.10 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris | |
| 6 | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Pelaksanaan | Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar | ROO.25.35.04.08 | Inspektur/ Sekretaris | Penggunaan barang melebihi umur ekonomis | internal | C | Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan | Inspektur/ Sekretaris | |
| | | | Pelaksanaan | Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan | RF.25.35.04.11 | Inspektur/ Sekretaris | Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa | internal | C | Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan | Inspektur/ Sekretaris | |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | | C/UC | Dampak | |
|----|---|---|--------------------|--|-----------------|-----------------------|---|------------------------|--------|---|-------------------------------|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | | Pihak yang Terkena | |
| | | | | | Risiko | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Pertanggungjawaban | Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi / kelompok diluar kebutuhan jabatan | RF.25.35.04.12 | Inspektur/ Sekretaris | Penyalahgunaan wawasan jabatan | internal | C | Kurangnya BMD yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dinas pada saat dibutuhkan | Inspektur/ Sekretaris | |
| | Program : Penyelenggaraan Pengawasan | Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan) | Pelaksanaan | Level Kapabilitas APIP Inspektorat masih belum memadai | RSO.25.35.04.01 | Inspektur | Kurangnya SDM APIP yang memadai dan berkompeten serta kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan oleh APIP | internal | C | Level Kapabilitas APIP Inspektorat menurun | Inspektur | |
| | | | Pelaksanaan | Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar | RSO.25.35.04.02 | Inspektur | Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk belum adanya sistem berbasis teknologi yang mempermudah proses. | Internal dan Eksternal | C | Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar menjadi level 2 | Kepala Daerah | |
| | | | Pelaksanaan | Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar | RSO.25.35.04.03 | Inspektur | Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap pemenuhan area MCP. | Internal dan Eksternal | C | Tidak tercapainya nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar minimal 80% | Kepala Daerah dan OPD terkait | |
| 7 | Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal | Pelaksanaan | Persentase OPD yang jumlah temuannya minimal | ROO.25.35.04.09 | Inspektur/ Irban | Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan | internal | C | Jumlah temuan yang harus dituntaskan menjadi bertambah | Inspektur/ Irban | |
| | | | Pelaksanaan | Persentase OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu | ROO.25.35.04.10 | Inspektur/ Irban | OPD kurang memahami peraturan perundang-undangan | internal | C | OPD berpotensi kena temuan dari hasil pemeriksaan APIP baik APIP internal dan eksternal | Inspektur/ Irban | |
| | | | Pelaksanaan | Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan | RF.25.35.04.13 | Inspektur/ Sekretaris | Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan | internal | C | tidak bisa mempertahankan opini WTP | Inspektur/ Irban | |
| | | | Pertanggungjawaban | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.35.04.14 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris | |
| 8 | Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu | Pelaksanaan | Tuntasnya OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu | ROO.25.35.04.11 | Inspektur/ Irban | Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan | internal | C | tidak bisa mempertahankan opini WTP | Inspektur/ Irban | |
| | | | Pelaksanaan | Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan | RF.25.35.04.15 | Inspektur/ Irban | Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan | internal | C | tidak bisa mempertahankan opini WTP | Inspektur/ Irban | |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | | C/UC | Dampak | |
|----|---|--|---------------------|--|-----------------|------------------------------|--|------------------------|--------|---|-------------------------------|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | | Pihak yang Terkena | |
| | | | | | Risiko | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Pertanggung jawaban | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.35.04.16 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris | |
| | Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi) | Pelaksanaan | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target. | RSO.25.35.04.04 | Inspektur | Kurangnya koordinasi, pemahaman dan komitmen OPD dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko | Internal dan Eksternal | C | Tidak tercapainya target penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko sebesar 90 % | Kepala Daerah dan OPD terkait | |
| | | | Pelaksanaan | Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | RSO.25.35.04.05 | Inspektur | Koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi belum optimal. | Internal dan Eksternal | C | Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi rendah yang menggambarkan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Kota Denpasar menjadi diragukan | Kepala Daerah dan OPD terkait | |
| | | | Pelaksanaan | Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat | RSO.25.35.04.06 | Inspektur | kurangnya tenaga pendamping dari Inspektorat Kota Denpasar | Internal | C | Kurang optimalnya pemenuhan dokumen serta perbaikan hasil evaluasi secara tepat waktu dan tepat sasaran. | OPD yang terkait | |
| 9 | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Cakupan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan | Pelaksanaan | Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja | ROO.25.35.04.12 | Inspektur/ Irban | OPD mendapatkan kendala atau belum memenuhi penuntasan temuan | internal | C | Persentase penuntasan temuan dibawah 80% | Inspektur/ Irban | |
| | | | Pelaksanaan | Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan | RF.25.35.04.17 | Inspektur/ Irban | Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan | internal | C | tidak bisa mempertahankan opini WTP | Inspektur/ Irban | |
| | | | Pertanggung jawaban | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.35.04.18 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris | |
| 10 | Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi | Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi | Pelaksanaan | Meningkatnya pelaksanaan kegiatan OPD sesuai peraturan perundang-undangan | ROO.25.35.04.13 | Inspektur/ Sekretaris/ Irban | Tidak seimbang antara tenaga pendamping dengan jumlah OPD yang mohon pendampingan | internal | C | Level Maturitas SPIP menurun | Inspektur/ Sekretaris/ Irban | |
| | | | Pelaksanaan | Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan | ROO.25.35.04.14 | Inspektur/ Sekretaris/ Irban | Masa Pensiun, Rotasi dan Mutasi ASN APIP | internal | C | Level kapabilitas APIP menurun | Inspektur/ Sekretaris/ Irban | |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | |
|----|----------|--------------------|---------------------|---|----------------|-----------------------|---|----------|--------|---|-----------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Pelaksanaan | Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan | RF.25.35.04.19 | Inspektur/ Irban | Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan | internal | C | tidak bisa mempertahankan opini WTP | Inspektur/ Irban |
| | | | Pelaksanaan | Penipuan atas penyedia fiktif dalam pemilihan penyedia kegiatan | RF.25.35.04.20 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3)juntuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris |
| | | | Pertanggung jawaban | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.35.04.21 | Inspektur/ Sekretaris | 1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3)juntuk mendapatkan keuntungan pribadi | internal | C | berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara | Inspektur/ Sekretaris |



Form 4
Hasil Analisis Risiko

| Nama Pemda | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Tahun Penilaian | : 2025 | | | | |
| Tujuan Strategis | : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | |
| Analisis Risiko | | | | | |
| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| I | Risiko Strategis Pemda | | | | |
| 1 | Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal | RSP.25.35.04.01 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif | RSP.25.35.04.02 | 4 | 4 | 16 |
| 3 | Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.03 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | Tuntutan Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.04 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik | RSP.25.35.04.05 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.06 | 4 | 4 | 16 |
| II | Risiko Strategis OPD | | | | |
| 1 | Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | RSO.25.35.04.05 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat | RSO.25.35.04.06 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Tuntutan Penguatan dan Pertahanan Level Kapabilitas APIP Inspektorat | RSO.25.35.04.01 | 3 | 1 | 3 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko |
|-----|---|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 4 | Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar | RSO.25.35.04.02 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar | RSO.25.35.04.03 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target. | RSO.25.35.04.04 | 2 | 1 | 2 |
| II | Risiko Operasional OPD | | | | |
| 1 | Benturan kepentingan dalam penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa | ROO.25.35.04.06 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar | ROO.25.35.04.08 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Terjadi keterlambatan pengajuan draft SK Walikota | ROO.25.35.04.05 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Benturan kepentingan pelaksanaan diklat masing-masing APIP | ROO.25.35.04.03 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Persentase OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu | ROO.25.35.04.10 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Tuntasnya OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu | ROO.25.35.04.11 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja | ROO.25.35.04.12 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Meningkatnya pelaksanaan kegiatan OPD sesuai peraturan perundang-undangan | ROO.25.35.04.13 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan | ROO.25.35.04.14 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan | ROO.25.35.04.01 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Terjadi kekurangan anggaran pembayaran gaji & tunjangan ASN | ROO.25.35.04.02 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil | ROO.25.35.04.04 | 2 | 1 | 2 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko |
|-----|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 13 | Peningkatan tagihan Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | ROO.25.35.04.07 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Persentase OPD yang jumlah temuannya minimal | ROO.25.35.04.09 | 2 | 1 | 2 |
| | Risiko Fraud (RF) | | | | |
| 1 | Tidak terakomodirnya rencana pengadaan barang ke dalam RKBMD | RF.25.35.04.07 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.08 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan | RF.25.35.04.11 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi / kelompok diluar kebutuhan jabatan | RF.24.35.04.12 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi kepegawaian terkait gaji/ pendapatan pegawai | RF.25.35.04.02 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.35.04.03 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.04 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan | RF.25.35.04.13 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.35.04.14 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan | RF.25.35.04.15 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.35.04.16 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan | RF.25.35.04.17 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.35.04.18 | 3 | 1 | 3 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko 6=4x5 |
|-----|---|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 14 | Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan | RF.25.35.04.19 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.35.04.21 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Terjadi gratifikasi dalam proses penyusunan anggaran Gaji ASN | RF.25.35.04.01 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.35.04.05 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.06 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.35.04.09 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.10 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Penipuan atas penyedia fiktif dalam pemilihan penyedia kegiatan | RF.25.35.04.20 | 2 | 1 | 2 |

Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

Ir. Putu Naniq Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

| Nama Pemda | | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar | | | | |
|---------------------|--|--|--------------|----------------|---|--|
| Tahun Penilaian | | : 2025 | | | | |
| Tujuan Strategis | | : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | |
| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Risiko Strategis Pemda | | | | | |
| 1 | Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal | RSP.25.35.04.01 | 16 | Kepala Daerah | Ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran penguatan Kapabilitas APIP termasuk sarana dan prasarana pendukung belum optimal | Level Kapabilitas APIP menjadi di level 2 |
| 2 | Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif | RSP.25.35.04.02 | 16 | Kepala Daerah | Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah | Level Maturitas SPIP tidak bisa mempertahankan level 3 |
| 3 | Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.03 | 16 | Kepala Daerah | Adanya faktor-faktor indikasi terjadinya fraud yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Opini BPK (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa dipertahankan |
| 4 | Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar | RSP.24.35.04.04 | 16 | Kepala Daerah | Masih ada program kerja pada OPD yang belum tepat sasaran, belum inovatif dan kreatif serta adaptif terhadap perubahan di dalam melakukan pelayanan publik. | Tidak bisa dipertahankan Predikat Reformasi Birokrasi minimal BB di Pemerintah Kota Denpasar |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|--|-----------------|--------------|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik | RSP.25.35.04.05 | 16 | Kepala Daerah | Kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara belum optimal | Tidak tercapainya hasil evaluasi SAKIP minimal A |
| 6 | Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.06 | 16 | Kepala Daerah | Kurangnya pendampingan dari Inspektorat untuk mencegah terjadinya temuan pada OPD binaan | Tingkat kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku masih rendah |
| II | Risiko Strategis OPD | | | | | |
| NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko) | | | | | | |
| II | Risiko Operasional OPD | | | | | |
| NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko) | | | | | | |



Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

(Handwritten signature)
 Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

| Nama Pemda | | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|
| Tahun Penilaian | | : 2025 | | | | | |
| Tujuan Strategis | | : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | | |
| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | Risiko Strategis Pemda | | | | | | |
| 1 | Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal | RSP.25.35.04.01 | Melakukan Pelatihan dalam rangka penilaian Kapabilitas APIP dengan mengundang Narasumber dari BPKP | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP | Kepala Daerah | 1 Tahun |
| 2 | Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif | RSP.25.35.04.02 | Melaksanakan Pelatihan SPIP melalui daring dengan Narasumber dari BPKP | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP | Kepala Daerah | 1 Tahun |
| 3 | Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.03 | Terlaksananya reviu LKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan. | Kepala Daerah | 1 Tahun |
| 4 | Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.04 | Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi. | Kepala Daerah | 1 Tahun |
| 5 | Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik | RSP.25.35.04.05 | Terlaksananya Penilaian, Monitoring dan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP. | Kepala Daerah | 1 Tahun |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----|---|-----------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 6 | Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.06 | Melakukan Reviu, Monitoring dan Evaluasi serta, Pendampingan kepada OPD binaan | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Kepala Daerah | 1 Tahun |
| II | Risiko Strategis OPD | | NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko) | | | | |
| II | Risiko Operasional OPD | | NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko) | | | | |



 Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar
 Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN

| Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan | | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| No | Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | Risiko Strategis Pemda | | | | | | |
| 1 | Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Inspektorat Kota Denpasar, BPKP Perwakilan Provinsi Bali | Pemerintah Kota Denpasar | 1 Tahun | 1 Tahun | Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan penilaian kapabilitas APIP |
| 2 | Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Inspektorat Kota Denpasar, BPKP Perwakilan Provinsi Bali | Perangkat Daerah Terkait | 1 Tahun | 1 Tahun | Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen SPIP |
| 3 | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan. | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Inspektorat Kota Denpasar, BPK RI | Perangkat Daerah Terkait | 1 Tahun | 1 Tahun | Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa laporan LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali |
| 4 | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi. | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Inspektorat Kota Denpasar, MENPAN RB | Perangkat Daerah Terkait | 1 Tahun | 1 Tahun | Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen RB |

| No | Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|-----|--|--|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 5 | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP. | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Inspektorat Kota Denpasar, MENPAN RB | Perangkat Daerah Terkait | 1 Tahun | 1 Tahun | Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen SAKIP |
| 6 | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Inspektorat Kota Denpasar, Inspektorat Provinsi Bali, BPK, BPKP | Perangkat Daerah Terkait | 1 Tahun | 1 Tahun | Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) |
| II | Risiko Strategis OPD | | | | | | |
| | Nama OPD : Inspektorat | | | | | | |
| | NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko) | | | | | | |
| III | Risiko Operasional OPD | | | | | | |
| | Nama OPD : Inspektorat | | | | | | |
| | NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko) | | | | | | |

Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar



Iti Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001



Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

| Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan | | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025 : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| No | Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 | Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Kepala Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan |
| 2 | Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Kepala Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan |
| 3 | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan. | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Kepala Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan |

| No | Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 4 | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi. | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Kepala Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan |
| 5 | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP. | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Kepala Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan |
| 6 | Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan | Kepala Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan |
| | | | | | | |

Denpasar, 5 Januari 2025
Inspektur Daerah Kota Denpasar



Ir. Putu Naring Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

| Nama Pemda | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-------|--------|-----|-----|-------------------------|---------------------------|-----|
| Tahun Penilaian | : 2025 | | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis | : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : Unsur Pengawasan Pemerintahan | | | | | | | | | |
| No | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Ket | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Ket |
| | | | Tanggal terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1 | Risiko Strategis Pemda | | | | | | | | | |
| 1 | Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal | RSP.25.35.04.01 | | | | | | | | |
| 2 | Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif | RSP.25.35.04.02 | | | | | | | | |
| 3 | Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota | RSP.25.35.04.03 | | | | | | | | |
| 4 | Tuntutan Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar | RSP.25.35.04.04 | | | | | | | | |
| 5 | Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik | RSP.25.35.04.05 | | | | | | | | |

| No | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Ket | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Ket |
|----|---|----------------|-----------------|-------|--------|-----|-----|-------------------------|---------------------------|-----|
| | | | Tanggal terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 19 | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.35.04.09 | | | | | | | | |
| 20 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.35.04.10 | | | | | | | | |
| 21 | Penipuan atas penyedia fiktif dalam pemilihan penyedia kegiatan | RF.25.35.04.20 | | | | | | | | |



Denpasar, 3 Juli 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

